



E-ISSN: 2964-9269 ISSN: 2252-4673

Captain Wardiman's Way of Fighting the Dutch Petrik Matanasi	157
The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims Affilah Putra Pratama, et al.	191
History of Gemeente Probolinggo 1918-1942	208
Afif Maulana, et al.	
Soekertijo: The Lunge of Officers from Lumajang	226
1946-1988	
Dwi Ayu Anggraeni, et al.	
Utilization Of the Sarekat Islam Building in	260
Semarang As A Living History Learning Model	
for History Subjects During The Indonesian	
Movement As A Living History Learning Model	
for History Subjects During The Indonesian	
Movement	
Siti Khusnul Khotimah, et al.	
The Implementation of Merdeka Curriculum on	271
Historical Subject at SMA Negeri 3 Jember	1 1 3 3
Laily Setyawati, et al.	
Implementation of Women's Movement Values in	291
Java as History Learning Resources	
Aqilla Az-Zahra	
Soviet Union Spionage Arrest In Indonesia 1982	307
Syifa Surya Ukasyah, et al.	
Application of the Learning Contract Learning	321
Method to History Learning Activities of Class	
X Students in Online Business and Marketing	
at State Vocational High School 1 Pontianak	
Lidia, et al.	



340

Publisher: History Education Study Program University of Jember

Regency

Megalithic Culture In Suboh Sub District Situbondo

Nurcholis Fitrio Handoko, et al.

The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review

**Based On Territorial Claims** 

Affilah Putra Pratama<sup>1</sup>, Nara Setya Wiratama<sup>2</sup>, Heru Budiono<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email: naraswiratama@unpkediri.ac.id

**Abstract** 

The land of Palestine is holy land for the three major religions, namely Islam,

Christianity and Judaism. Israel and Palestine are countries that claim that this land

is their territory, so this has sparked a prolonged conflict between the two. This

research aims to provide an overview of the history of territorial claims in the

Israeli-Palestinian region, territorial claims based on an Israeli-Palestinian

perspective, and efforts to resolve the Israeli-Palestinian conflict. Researchers use

the historical method with a qualitative approach, which has stages of heuristics,

criticism, interpretation and historiography. The research results concluded that the

Israeli-Palestinian conflict is a complex problem. The involvement of religious,

political and historical dimensions in it can influence a person's views and

understanding of the Israeli-Palestinian territorial claims. Through this research, it

can be seen that the importance of good diplomacy and mediation can encourage

the creation of commitment and trust in each other, thereby creating a sense of

tolerance which can be used as the key to fair sovereignty for both parties.

**Keywords:** Israel, Palestine, Islam, Judaism

P-ISSN: 2252-4673 E-ISSN: 2964-9269

Volume 7, Issue 2

Desember 2023



### PENDAHULUAN

Bulan Oktober 2023 dunia di kejutkan kembali dengan peperangan yang terjadi antara Israel-Palestina. Pasukan Israel memperluas serangan darat di wilayah utara Gaza pada Jumat (27/10) malam. Bombardir yang dilancarkan merupakan serangan terbesar dari Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023 (CNBC, 2023). Ribuan korban meninggal dari kedua belah pihak, tidak sedikit juga Masyarakat sipil seperti Perempuan, anak-anak bahkan bayi menjadi korbannya. Banyak kesedihan dirasakan semua orang, mengapa harus ada konflik disaat dunia membutuhkan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu konflik terpanjang di dunia dan tak kunjung selesai hingga saat ini. Konflik ini sangat kompleks mengingat banyak melibatkan dimensi politik, ekonomi, agama ditambah akar sejarah keduanya yang kuat membuat satu sama lain memiliki klaim tumpang tindih. Perseteruan Israel dan Palestina dimulai sekitar awal abad 19 yang ketika itu kaum minoritas Yahudi Eropa menginginkan adanya *Jewish Homeland* (Rumah Nasional Yahudi) (Sumertha KY, 2017). Bagi mereka selain disatukan melalui ikatan darah orang Yahudi harus memiliki semacam tanah air sebagai identitas pemersatu bangsa. Keinginan Yahudi Eropa tersebut terjadi karena serangkaian diskriminasi yang didapatkan bangsa Yahudi di Eropa sehingga mereka memerlukan sebuah tanah air sebagai perlindungan mereka.

Latar belakang sejarah yang kuat dan adanya dimensi agama sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan membuat Palestina dipilih sebagai destinasi Yahudi Eropa untuk perlindungan. Eksodus kaum Yahudi semakin besar pasca tragedi Holocaust di Eropa. Holocaust adalah sebuah peristiwa penganiayaan serta pembantaian terstruktur terhadap sekitar 6.000.000 orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutunya (Mutiarasari, 2023). Situasi tersebut semakin membuat jumlah populasi Yahudi Eropa kian membludak di Palestina. Namun nampaknya keberadaan Yahudi tersebut menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi masyarakat Arab Islam kala itu, hal itu dipicu karena orang Yahudi disana menjadi tuan tanah dan berhak atas pembelian harta non Arab yang akhirnya melahirkan kecemburuan sosial. Setelah keruntuhan Ottoman, Palestina menjadi wilayah dibawah kendali

HISTORICA

Inggris sehingga Inggris yang mempunyai hubungan dekat dengan Yahudi melalui Menteri mereka Balfour membuat Inggris setidaknya sedikit mengistimewakan Bangsa Israel tersebut. Keberadaan Inggris dan kecemburuan sosial Masyarakat lokal Palestina terhadap Yahudi inilah yang menjadi cikal bakal konflik nantinya dan menjadi salah satu masalah yang sedang diusahakan dunia untuk diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan tujuan sebagai berikut: Tinjauan Sejarah Klaim Teritorial Di Wilayah Israel-Palestina, Klaim Teritorial Berdasarkan Perspektif Israel-Palestina, dan Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina melalui sebuah penelitian dengan judul Perjuangan Kedaulatan Israel-Palestina: Tinjauan Berdasarkan Klaim Teritorial.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Sejarah dengan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber digital untuk mengumpulkan data dari artikel ilmiah dan buku teks yang telah diterbitkan sebelumnya. Metode Sejarah memiliki tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, dalam Wiratama, 2022). Tujuan dari metode ini adalah untuk menyajikan fakta dari peristiwa Sejarah dan dapat menarik kesimpulan yang menarik. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tanpa melakukan tindakan, peneliti hanya menyoroti permasalahan dengan berbagai fakta-fakta yang ada dan memberikan pemikirannya terkait suatu permasalahan (Wiratama, 2023). Pengumpulan data, penyajian data verifikasi, dan kesimpulan adalah semua bagian dari proses penelitian. Semuanya disusun kembali sesuai dengan nilai kebenaran setelah dikumpulkan. Penulisan historiografi menggunakan bahasa yang sederhana sehingga pembaca mengerti apa yang dikatakan dan dapat memahami isi dari apa yang disampaikan.

Adapun untuk tahapan penelitan peneliti menggunakan tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama heuristik, berupa mencari dan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak mungkin sebagai sumber referensi sesuai dengan substansi yang ingin dibahas. Tahapan selanjutnya kritik, yakni melakukan perbandingan dan kajian lebih mendalam sumber satu dengan yang lain sehingga dapat mempertimbangkan keabsahan data. Tahap ketiga adalah interpretasi, peneliti

HISTORICA

menggunakan tahap ini sebagai sarana untuk membantu menafsirkan suatu peristiwa sejarah dengan memahami konteks sosial dan politik sehingga dapat menyusun narasi yang kuat dan komprehensif. Pada tahap ini Kuntowijoyo (dalam Sukmana, 2021) mengatakan bahwa imajinasi memainkan peranan penting dalam menyusun sebuah fakta sejarah. Menurutnya perlu bagi seorang sejarawan dapat mengimajinasikan peritiwa lampau, mengetahui peritiwa yang sedang terjadi dan memprediksi imbas yang ditimbulkan di masa yang akan datang (Sukmana, 2021). Tahap terakhir historigrafi, berupa susunan hasil interpretasi menjadi sebuah deskripsi sejarah dalam bentuk narasi kualitatif yang menarik.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Tinjauan Sejarah Klaim Teritorial Di Wilayah Israel-Palestina

# A. Awal Perseteruan Israel-Palestina Dan Pembentukan Negara Israel

Pada perang dunia II terjadi peristiwa genosida besar besaran bangsa Yahudi yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman. Peristiwa tersebut diberi nama tragedi Holocaust. Selama periodisasi 1933-1945 lebih dari 6 juta penduduk Yahudi menjadi korban tangan besi Hitler, situasi tersebut membuat kelompok gerakan nasionalisme Yahudi berpikir untuk membentuk suatu negara sebagai upaya menyelesaikan masalah penindasan bangsa Yahudi di Eropa. Keinginan mewujudkan sebuah negara sepertinya bukan hal baru bagi bangsa Yahudi pasalnya Thedor Herzl sempat menyuarakan gagasan ini. Herzl dinilai menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan gerakan Zionisme yang dikenal dengan istilah *the Jewish State* sebuah gerakan yang ditujukan untuk mendukung berdirinya negara Israel di wilayah Palestina (Zulkarnaini, 2021). Zionisme adalah sebuah gerakan politik yang diciptakan oleh orang Yahudi dengan tujuan utama menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berpencar ke seluruh dunia sejak ribuan tahun agar kembali ke tanah asal yaitu Palestina (Maulani, 2002).

Keberadaan bangsa Yahudi yang selalu dianggap bangsa pendatang dan penindasan oleh bangsa Eropa membawa satu kesimpulan bahwa tak peduli terasimilasinya mereka bangsa Yahudi tetap akan dibenci oleh Dunia. Hal ini disebabkan bahwa bangsa Yahudi senantiasa berpindah tempat selama berabad-



abad lamanya. Sentimen anti semithic inilah yang melatarbelakangi Herzl mewujudkan gerakan Zionisme tersebut. Salah satu strategi terdepan Zionis adalah menggalang dukungan negara negara dunia melalui Yahudi Eropa, Dr. C. Wheizmann. Wheizmann berhasil merangkul simpati menteri luar negeri Inggris saat itu, Balfour Pada 2 November 1917. Balfour membuat sebuah deklarasi yang mengumumkan dukungan Inggris dalam pembentukan "rumah nasional" bagi bangsa Yahudi. Setelah kekalahan kesultanan Ottoman pada tahun 1918 praktis berdasarkan deklarasi Balfour, Inggris menjanjikan tanah Palestina bagi bangsa Israel. Deklarasi ini dinilai pemicu timbulnya sejarah konflik Israel-Palestina, sebelum tahun 1915 Inggris ternyata terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Syarif Husain sebagai bentuk kesepakatan kerja sama melawan Ottoman. Sejarawan dan Jurnalis Ian Black mengatakan pemerintah Inggris tidak memikirkan negara negara Arab ketika deklarasi Balfour tersebut dibuat, Inggris dipercaya menjadikan negara negara Arab sebagai pion untuk memuluskan hasrat mereka dalam memenangkan perang. Setelah kemenangan Inggris pada perang dunia I, Palestina diambil alih oleh pihak Inggris dan semenjak itu pula tanah Palestina yang awalnya rumah indah bagi tiga agama langit perlahan berubah menjadi wilayah sengketa di masa depan (Muchsin, 2015).

Sepanjang tahun 1920 — 1939 diperkirakan terjadi lonjakan besar besaran bangsa Yahudi Eropa ke tanah Palestina, situasi tersebut memicu konflik horizontal yang diakibatkan oleh komposisi penduduk Israel yang semakin tak terkendali sehingga menimbulkan sebuah konflik yang dikenal sebagai Revolusi Buraq pada 1929 (Djuyani, 2021). Konflik semakin panas kala bangsa Yahudi yang merupakan pendatang memiliki akses terhadap pembelian properti non Arab sehingga memungkinkan bangsa Yahudi membeli tanah sekaligus menjadi tuan tanah. Palestina yang merasa terjajah sejak pengambilalihan Inggris melakukan perlawanan, namun upaya perlawanan tersebut dapat diredam oleh militer Inggris yang bekerja sama dengan pasukan khusus Israel (Hoganah dalam Zulkarnaini, 2021). Konflik yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan Inggris akhirnya melakukan investigasi khusus terkait masalah masyarakat lokal dan bangsa pendatang Yahudi sehingga akhirnya Inggris



secara resmi mengeluarkan perjanjian The Passfield White Paper pada tanggal 20 Oktober 1930 guna menarik simpati Bangsa Arab. Dokumen tersebut kurang lebih berisi penghentian migrasi Yahudi selama orang Arab Palestina belum mendapat pekerjaan dan yang kedua bangsa Yahudi dilarang membeli tanah selama masih ada orang Arab yang belum mempunyai tanah (Soebartarjo dalam Susmihara 2011). Keputusan tersebut jelas membuat kelompok Yahudi di luar Palestina menolak dan merasa dirugikan dikarenakan pada waktu yang sama sedang terjadi pembantaian besar besaran Yahudi di Jerman. Keadaan yang demikian membuat ketegangan diantara Israel dan Arab semakin kuat. Merasa konflik Israel-Palestina tak kunjung usai, Inggris akhirnya menarik diri dari Palestina dan menyerahkan sepenuhnya konflik Israel-Palestina tersebut ke tangan PBB. Pada prosesnya, akhirnya PBB mencetuskan Partition plan 1947 yang membagi wilayah Palestina dan mengambil sebuah pengambilan suara, hasilnya lebih dari 30 negara termasuk Amerika dan Soviet menyetujui pembentukan negara Israel di Palestina sehingga setahun setelahnya pada tahun 1948 negara Israel resmi terbentuk sebagai sebuah negara independen.

# B. Perang Arab-Israel 1948 dan Dominasi Israel Terhadap Wilayah Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina dipicu setelah PBB mengeluarkan *Partition Plan 1947* yang mencetuskan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara mandiri untuk Israel dan Palestina serta Yerusalem menjadi kota resmi yang diperintah oleh PBB. Kendati demikian perselisihan keduanya juga tak kunjung reda. Pembagian dua wilayah tersebut oleh PBB dinilai Bangsa Arab kurang adil sebab dinilai lebih menguntungkan bangsa Israel ketimbang Palestina itu sendiri. Sulitnya mencapai kesepakatan membuat konflik Israel-Palestina kembali pecah, hingga pada 30 November 1947 bangsa Arab melakukan perang gerilya dan memulai serangan teroris (Ben-Dror, 2013). Ketegangan memuncak setelah pada Mei 1948, Israel resmi memproklamirkan diri sebagai negara independen yang disetujui oleh Amerika dan Uni Soviet. Situasi tersebut semakin memicu rentetan perselisihan bangsa Arab dengan Israel sehingga membuat Liga Arab naik pitam dan mendeklarasikan perang



sebagai bentuk respon mereka. Jamal al Hussayni selaku delegasi Komite Arab tertinggi waktu itu mengirim pesan kepada PBB dan menyatakan bahwa keberadaan pasukan Liga Arab bermaksud membela Hak Rakyat Palestina sebagai Mayoritas melawan kolonisasi pihak Zionis Yahudi (Wibowo, 2014). Keberadaan Liga Arab sendiri terdiri atas Mesir, Yordania, Suriah, Iraq, Lebanon, Arab Saudi dan Yaman. Liga Arab berhasil mengepung Israel selama beberapa minggu sebelum akhirnya PBB turun tangan dan meredam konflik tersebut. Pada masa gencatan senjata antara pihak Liga Arab dengan Israel, Israel diduga melakukan penyelundupan senjata dari Ceko melalui kapal kapal pelabuhan di Israel. Penyelundupan ini sebagai upaya penguatan militer Israel dalam menghadapi koalisi Arab. Adanya larangan embargo senjata oleh PBB membuat penyelundupan Ceko dipilih karena dirasa aman mengingat pada masa itu Ceko termasuk salah satu pemasuk senjata yang relatif kuat. Israel yang awalnya dikepung kini berhasil menyerang balik pasukan Liga Arab. Tak hanya melanggar larangan Embargo senjata dari PBB, kelompok Ekstrimis Zionis juga melakukan pelanggaran lain dengan membunuh perwakilan dan penengah konflik Israel-Arab PBB, Bernadotte (Sianturi, tanpa tahun). Tambahan senjata tersebut membuat keunggulan pada militer Israel, dengan bertambahnya amunisi senjata Israel, membuat peta kekuatan militer berbalik sementara disisi lain kegagalan koordinasi Liga Arab membuat perang ini kemudian dimenangkan oleh Israel.

Seusai peperangan Israel dan Liga Arab atau yang kerap disebut Al Nakba, jumlah pengungsi Palestina kian bertambah. Hal itu dikarenakan banyak dari mereka yang mengungsi untuk menghindari pertempuran. Situasi diperburuk akibat sebagian wilayah mereka yang dikuasai oleh Israel dan pengambilan kekuasaan sebagian wilayah oleh Jordan dan Mesir seperti kota Jericho, Bethlehem, Hebron dan Nablus yang dikuasai Jordan serta Gaza yang berada dibawah Mesir (Wibowo, 2014).

### C. Perang Enam Hari 1967 dan Perjanjian Camp David

Setelah perang Israel-Arab jilid pertama berakhir praktis ketegangan sempat menurun diantara keduanya. Situasi kembali panas pada 29 Oktober



1956, Israel bersama Inggris dan Perancis mengepung Sinai dan menaklukan Terusan Suez. Kemenangan Israel pada perang Israel-Arab membuat kelompok ekstrimis tak segan segan melakukan penjarahan, merampas dan membunuh warga sipil Palestina. Hal tersebut diabadikan Paul Findley dalam sebuah lukisan yang mengilustrasikan desa, rumah, dan taman yang dihancurkan kelompok ekstrimis (Zulkarnaini, 2021). Sembilan tahun berselang perang kembali meletus. Pada 1967 Duta Besar Uni Soviet di Kairo, Dimitri Pojidaev mengirim informasi yang menyebut pergerakan militer Israel di Suriah. Merespon laporan tersebut, Mesir kemudian mengirim pasukan militer ke Sinai dan memblokade Selat Tiran yang menghubungkan Israel dengan Laut Merah. Pada 5 Juni 1967 secara mengejutkan pangkalan udara Mesir dibombardir militer udara Israel praktis hal tersebut menyebabkan kelumpuhan total militer Mesir. Merespon hal demikian Jordania dan Suriah berinisiatif melakukan serangan balik kearah pangkalan udara Israel. Sayangnya upaya tersebut gagal berkat keunggulan militer udara Israel, Israel berhasil memukul mundur Jordan dan Suriah sehingga keduanya bernasib sama dengan Mesir. Belakangan dipercaya informasi yang dikirim Soviet tersebut palsu dan para petinggi Soviet sepakat menyatakan bahwa tak ada informasi demikian yang diberikan kepada pihak Mesir (Popp, 2006). Selama enam hari tersebut Israel berhasil menaklukan dan merebut Gaza dan Sinai dari Mesir dan Tepi Barat berhasil diambil alih dari Jordania sekaligus wilayah pegunungan Golan kini menjadi teritori Israel.

Pada tahun 1973 Anwar Sadat selaku Presiden Mesir berkoalisi dengan Presiden Syria Hafez Al Assad keduanya bekerja sama dalam rangka membalas dan merebut kembali Sinai dari Israel pasca kekalahan di Terusan Suez (Meliasari, 2011). Penyerangan militer Mesir 6 Oktober terhadap Israel tersebut bertepatan hari Yom Kippur itulah mengapa perang ini juga dikenal dengan nama perang Yom Kippur. Yom Kippur adalah Hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi biasa disebut hari Penebusan. Berkat bantuan upgrade senjata oleh Uni Soviet dan kesolidan angkatan militer mereka, Mesir dan Suriah berhasil merebut kembali Sinai dan Pegunungan Golan dari Israel. Pada perang ini pula, untuk memutus bantuan Israel oleh Amerika Koalisi Arab mengajak



OPEC selaku pengekspor minyak Arab menghentikan pengeriman minyak keberbagai tempat. Menurut (Shambaugh, tanpa tahun), penghentian sementara pengiriman minyak dari Arab ke negara lain khususnya Amerika berlangsung sekitar Oktober 1973 sampai Maret 1974. Penghentian minyak oleh bangsa Arab tersebut membuat krisis minyak terjadi kesejumlah negara, situasi demikian membuat beberapa negara koalisi Israel berpikir dua kali apabila ingin membantu mereka (Putri, 2014). Merasa mendapat penawaran menarik Amerika berupa dukungan finansial dan militer, Mesir pada 26 Maret 1979 melalui pemimpin mereka Anwar Sadat bersama Presiden Amerika Jimmy Carter, keduanya resmi menandatangani perjanjian damai Israel-Mesir. Bagi Palestina perjanjian damai tersebut merupakan penghiatan Mesir dari Bangsa Arab dan membuat organisasi gerakan kemerdekaan Palestina marah dan kian masif melakukan pemberontakan terhadap militer Israel. Sementara disisi lain perjanjian damai Israel-Mesir membuat Mesir dicap penghianat sehingga beberapa negara Arab memutus hubungan diplomasi mereka dengan Mesir.

# Klaim Teritorial Berdasarkan Perspektif Israel-Palestina

# A. Dasar Klaim Israel Terhadap Wilayah Palestina

Desakan Israel terhadap wilayah Palestina tak lepas dari sejarah teologi mereka, pasalnya dalam kepercayaan Yahudi terdapat sebuah ayat suci pada Taurat (Pentateukh) yang dimana menyebutkan tanah Kanaan (Palestina) dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya sebagai pusat perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Bagi umat Yahudi, hubungan dengan tanah tersebut memiliki dimensi religius dan historis yang kuat. Pada (Simanjuntak, 2020) dijelaskan bagi kaum Yahudi pemberian tanah Kanaan untuk Israel tersebut merupakan salah satu bukti kesetiaan Tuhan seperti yang tertulis pada kitab Yosua sehingga menjadi dasar legalitas kuat Israel dalam mengklaim kepemilikan tanah Palestina. Selama berabad-abad, klaim ini diperkuat kembali dengan sebuah perayaan dan praktisi agama Yahudi yang kental dengan hubungan tempat-tempat suci di Palestina, termasuk Yerusalem, Bait Suci, dan Gunung Moria. Klaim Israel semakin kuat ketika pada 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan rencana pemisahan Palestina menjadi dua bagian



yakni negara Yahudi dan Arab, peristiwa ini penting lantaran ini merupakan wilayah cikal bakal lahirnya negara Israel. Setelah merdeka, sebagai negara independen Israel berpendapat bahwa kepemilikan kuasa pada wilayah Palestina dan perbatasan menjadi penting utamanya dengan hubungan pertahanan negara. Pada konteks ini Israel berpikir bahwa sebuah kuasa terhadap wilayah Palestina akan memudahkan mereka dalam memantau dan mengawasi pergerakan kelompok ekstrimis, serta dapat sebagai perlindungan awal Israel dari ancaman infiltrasi dan teror langsung. faktor lain yang mendasari klaim Israel ialah klaim ekonomi, karena tak dapat dipungkiri Palestina sebagai sebuah wilayah juga memiliki sebuah sumber daya alam yang melimpah (Kaslam, 2021).

Wilayah Palestina memiliki sumber daya melimpah, termasuk air, tanah yang subur, serta akses ke jalur perdagangan dan transportasi. Sebagai penghubung antar tiga benua Asia, Afrika, Eropa alasan wilayah Palestina yang strategis inilah kemudian membuat Israel berkeinginan menguasainya guna menjadi pusat kegiatan internasional mereka (Carr, 1993). Kontrol penuh terhadap wilayah tersebut diyakini oleh Israel sebagai faktor penting dalam menjaga keamanan pasokan dan kestabilan ekonomi mereka. Namun, perlu digaris bawahi klaim-klaim tersebut masih sangat diperdebatkan dan kontroversial, permasalahan ini melibatkan banyak dimensi politik, sosial, dan agama yang saling berkaitan. Pandangan dan Interpretasi terhadap klaim inipun beragam sehingga bersifat subjektif.

# B. Dasar Klaim Palestina Terhadap Wilayah Yang Dikuasai Israel

Sejarah klaim tanah Palestina berdasarkan sejarah panjang masyarakat Arab jelas memiliki klaim yang kuat terhadap keberadaan mereka di Palestina. Mereka berpendapat bahwa orang Arab telah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut sejak ratusan tahun dan memiliki akar sejarah yang kuat. Hal ini didasari oleh sejarah yang mengatakan pada abad 7 kendali kekuasaan wilayah Palestina yang sebelumnya berada ditangan Bizantium berhasil diambil alih oleh dinasti Umayyah yang dikemudian hari oleh bangsa Arab Palestina dipandang sebagai tanah air mereka (Susmiihara, 2011). Pandangan Palestina sebagai tanah air mereka itulah yang membuat orang Palestina merasa punya hak



atas kepemilikan wilayah Tepi Barat Gaza tersebut terlebih lagi setelah apa yang terjadi pada perang Nakba. Pada perang Nakba masyarakat lokal Palestina dipaksa untuk melarikan diri dan mengungsi akibat dari konflik tersebut. Ribuan korban konflik inilah yang kemudian menjadi pendukung klaim Palestina dan meminta meminta hak sebagai bentuk kompensasi atas dampak perang tersebut. Palestina sendiri sebenarnya telah mendapatkan pengakuan Internasional, pada 2012 saja sebanyak 130 negara mengakui keberadaan Palestina secara resmi. Pengakuan ini menjadi legitimasi dan bukti dukungan Internasional terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, meski telah mendapatkan pengakuan Internasional sebagai sebuah negara, konflik wilayah Israel dan kedekatan Israel dengan negara adidaya seperti Amerika akhirnya membuat semacam tembok penghalang status Politik Palestina dimata dunia.

# Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina yang seperti tanpa akhir menjadi bahan diskusi yang menarik, pasalnya apabila diakumulasikan dengan isu sensitif didalamnya konflik ini selalu sukses menimbulkan pro kontra dalam setiap pembahasannya. Konflik yang erat kaitannya dengan sengketa teritorial perebutan status Yerusalem ini membuat banyak pihak mencoba untuk menyelesaikannya. Berbagai upaya upaya perdamaian seperti Konfrensi Madrid pada 1991 pun seperti tak dapat mencapai hasil yang signifikan. Amerika yang saat itu merupakan negara superpower berinisiatif untuk menjebatani Israel dan Palestina ketika konfrensi oslo ini berlangsung. Pada waktu itu Konfrensi Madrid yang digelar di Washington DC tersebut diwakili oleh staf pemerintahan Israel dengan Palestina serta beberapa negara Arab termasuk Jordania dan Suriah (Islamiyah, 2016). Prosesi konferensi di Oslo kemudian digelar dengan secara rahasia dan hanya melibatkan tokoh penting didalamnya. Tercatat pada 13 September 1993, Perjanjian Oslo I menghasilkan keputusan pembentukan Otoritas khusus Palestina yang bertanggung jawab atas pemerintahan khusus di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Israel juga diharuskan menarik angkatan mereka dari beberapa kawasan Palestina.

Perundingan kemudian kembali diselenggarakan setelahnya, Perjanjian Oslo II pada 28 september 1995 berhasil disepakati dan membagi wilayah Tepi



Barat menjadi tiga bagian dengan tingkat kendali yang berbeda antara otoritas Palestina dan Israel. Sayangnya, penerapan kesepakatan ini jauh dari kata berhasil, banyaknya tantangan seperti gerakan radikalisme dan perbedaan pandangan politik disinyalir menjadi alasan hambatan mengapa kata damai sulit untuk disepakati bagi kedua belah pihak. Menurut (Faridz, 2011) kematian Yitzhag Rabin pasca Perjanjian Oslo II merupakan sebuah ironi dalam sejarah Israel, Yitzhak yang medukung perjanjian ini tewas terbunuh oleh golongan radikal Israel sehingga semakin mempersulit dan melahirkan ketegangan kembali pada keduanya. Berdasarkan (Masyrofah, 2015) sejumlah perjanjian diupayakan selepas perjalanan Oslo II seperti Memorandum Sungai Wye pada 1998, Sharm el-Sheikh di Mesir, Camp David II, hingga Konsep Peta Jalan Damai (Road Map) telah dilakukan meski demikian sayangnya konflik Israel-Palestina juga tetap berkelanjutan. Peran Amerika Serikat sebagai pihak penengah juga diyakini dapat menjadi kunci perdamaian di Timur Tengah terlebih hubungan Amerika Serikat dengan Israel terbilang dekat. Sayangnya, kecendrungan Amerika untuk berpihak dengan Israel menjadi masalah politik tersendiri, dukungan tersebut dapat dilihat dari bantuan politik Amerika Serikat kepada Israel pada forum internasional seperti PBB. Amerika dipercayai kerap menggunakan hak veto mereka untuk melindungi Israel dari kecaman dunia, hal tersebut menibulkan pro-kontra dan dinilai beberapa pihak tidak adil bagi Palestina (Paat). Selain Amerika, Indonesia juga memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina sebagai pengusung solusi dua negara Indonesia aktif dalam upaya mediator dan fasilitator dalam membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina (Madore, 2019).

### KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

Konflik Israel-Palestina merupakan sebuah perebutan wilayah yang didasari oleh suatu perbedaan pada konsepsi agama, politik, dan sejarah. Bermula ketika perjanjian pada 1915 yang dilakukan oleh Syarif Hussein dengan Inggris, Inggris dinilai tidak sepenuhnya menepati janji mereka yang kala itu dengan secara eksplisit mendukung pendirian negara Yahudi di Palestina melalui deklarasi



Balfour. Munculnya ketegangan politik dan ketidakpuasan masyarakat Arab terhadap deklarasi tersebut dinilai sebagai percikan awal dari serangkaian konflik yang pada akhirnya membuat Inggris menyerahkan masalah ini ke PBB. Untuk mengakhiri permasalahan ini, PBB kala itu mengambil jalan tengah dengan membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian yang dimana 55% untuk Yahudi dan 45% sisanya merupakan wilayah Arab. Alih alih mengakhiri konflik, rencana pembagian wilayah oleh PBB justru menimbulkan gelombang perpecahan lain bagi keduanya masalah lain berupa penolakan bangsa Arab terhadap hasil keputusan semakin diperparah dengan berita kemerdekaan Israel. Israel yang kala itu telah merasa mendapat pengakuan Internasional melalui Partition Plan 1947 menggunakan wilayah hasil pembagian PBB sebagai dasar pembentukan negara Israel setahun setelahnya. Dinamika politik wilayah Palestina selepas kemerdekaan Israel juga tak lepas dari perang dan konflik, baik dari Israel ataupun Palestina keduanya sama sama teguh pada pendirian masing-masing. Adanya hasrat menguasai Palestina berdasarkan faktor ekonomi dan politik dirasa berperan penting dalam upaya Israel mengklaim wilayah Palestina, selain itu apabila ditinjau dari letak geografisnya wilayah Palestina dapat dikatakan strategis mengingat wilayah ini menghubungkan ketiga benua sekaligus.

Adapun bagi Palestina anggapan tanah Palestina sebagai tanah air mereka tak lepas dari sejarah penaklukan tanah Palestina oleh Dinasti Umayyah pada abad 7 (Susmiihara, 2011). Pengaruh budaya Arab dan agama Islam serta penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa serapan turut diadopsi oleh mayoritas penduduk kala itu sehingga asimilasi tersebut telah membentuk identitas Arab di tanah Palestina. Pada akhirnya keduanya baik Israel ataupun Palestina memiliki klaim yang kuat atas wilayah yang sama, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Selama bertahun-tahun, PBB telah mengeluarkan banyak resolusi dan melakukan upaya mediasi untuk mencari solusi damai, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai. Selain itu, adanya intervensi dari negara-negara lain dan kelompok-kelompok ekstremis juga mempersulit upaya perdamaian. Meskipun demikian, PBB terus berusaha untuk menyelesaikan konflik

HISTORICA

ini melalui upaya diplomasi dan perundingan, serta memperkuat kehadiran dan

pengawasan di wilayah tersebut.

Saran

Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu konflik terpanjang di dunia dan

sampai saat ini masih diupayakan solusi untuk kedua negara, beberapa pendekatan

dan opsi seperti solusi dua negara yang dinilai cukup relevan dan adil dalam

menyelesaikan konflik ini namun perbedaan pandangan politik dan intervensi

negara negara lain menjadi suatu tantangan yang kompleks dan alasan betapa

sulitnya implementasi opsi tersebut. Seharusnya agar dapat mencapai solusi

berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestina sangat penting untuk menarik dan

mempengaruhi kelompok ekstremis. Proses ini melibatkan pendekatan

berkelanjutan untuk meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, dan

memupuk dialog inklusif. Perlu juga dukungan masyarakat internasional yang

dapat memotivasi dan menekan untuk mengurangi pengaruh kelompok ekstremis

dan memfasilitasi keterlibatan mereka di jalur perdamaian.

Pada akhirnya kunci penyelesaian konflik ini hendaknya semua pihak yang

terlibat dalam proses penyelesaian masalah harus bersifat netral dan bijaksana

termasuk Indonesia sebagai salah satu pendukung gagasan solusi dua negara,

Indonesia sudah seharusnya mulai membuka diri terhadap hubungan diplomasi

dengan Israel, dengan Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan Israel,

Indonesia dapat lebih efektif menekan Israel tentang kesejahteraan masyarakat

Palestina. Penelitian ini sekaligus dapat membuka paradigma baru bagi peneliti-

peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan kajian terkait konflik yang

terjadi di Israel-Palestina ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Pertama peneliti mengucapkan

terima kasih khusus kepada Bapak Nara Setya Wiratama, M.Pd yang telah

menyempurnakan penelitian dan memberikan bimbingan berharga selama proses

P-ISSN: 2252-4673 E-ISSN: 2964-9269



pengerjaan beserta menyediakan berbagai sumber yang relevan terkait permasalahan penelitian. Peneliti juga berterima kasih kepada teman-teman HIMA Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah turut andil dalam mendukung dan memfasilitasi peneliti dalam pengerjaan penelitian ini. Terakhir, untuk keluarga yang telah memberi dukungan moral dan motivasi selama proses pengerjaan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ben-Dror, E. (2013). The United Nationals Plan to Establish an Armed Jewish Force to implement the Partition Plan (United Nationals Resolution 181). *Diplomacy & Statecraft*, 563.
- Carr, W. G. (1993). Yahudi Menggenggam Dunia. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- CNBC. (2023, 10 29). Gempuran Israel Menggila, Hamas Janjikan Kekuatan Penuh. Gempuran Israel Menggila, Hamas Janjikan Kekuatan Penuh: https://www.cnbcindonesia.com/news/20231029000300-4-484515/gempuran-israel-menggila-hamas-janjikan-kekuatan-penuh#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Pasuka n%20Israel,dimulai%20pada%207%20Oktober%202023. adresinden alındı
- Djuyani, Y. (2021). Peran Indonesia di Palestina-Israel Masalah Keamanan . *jurnal masalah hukum, etika dan peraturan*.
- Faridz, S. (2011). Pandangan Hamas Terhadap Perjanjian Oslo I dan II (1993-1996). Universitas Indonesia.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Avatara*, 906-907.
- Kaslam. (2021). Dampak Aneksası Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina. *Review of Interntional Relations*, 116.
- Madore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestinsa. *CMES*.
- Masyrofah. (2015). Fakta Perjanjian Damai Dan Hubungan Diplomatik. Jakarta: UIN Jakarta.
- Maulani, Z. (2002). Zionisme: Gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Daseta.
- Meliasari, P. (2011). Mesir Pada Masa Pemerintahan Sadat : Upaya Anwar Dalam Perdamaian Mesir Israel. Jakarta.



- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel : Sejarah, Konflik, Masa depan. *Miqot*, 399.
- Mutiarasari, K. A. (2023, Januari 26). *Apa Itu Holocaust? Ini Penjelasan dan Sejarah Istilahnya*. https://news.detik.com/berita/d-6536246/apa-itu-holocaust-ini-penjelasan-dan-sejarah-istilahnya. adresinden alındı
- Nara Setya Wiratama, A. B. (2022). Perkembangan Sosialisme Di Dunia Abad Ke-19 Serta Pengaruhnya Di Indonesia. *Jurnal Historis*.
- Paat, V. (n.d.). Posisi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. 2,4,5,6,7,8.
- Popp, R. (2006). Stumbling Decidedly Into the Six-Day War. Middle East Institute.
- Putri, F. D. (2014). Krisis Minyak Tahun 1973 1974 Di Negara Negara Industri Sebagai Penggerak Tata Ekonomi Dunia Baru. *AVATARA*, 47.
- Shambaugh, G. (tanpa tahun). *Britannica*. Mei 14, 2023 tarihinde https://www.britannica.com/event/Nonimportan-Agreements adresinden alındı
- Sianturi, M. H. (tanpa tahun). Peran PBB Sebagai Orgnaisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi Negara Anggotanya dalam kasus State Imunitty Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi.
- Simanjuntak, I. F. (2020). Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan. *REAL DEDACHE*, 40.
- Soyono, J. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. Sejarah dan Budaya.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. Seri Publikasi Pembelajaran.
- Sumertha KY, I. G. (2017). he Involvement of the Indonesian Government in The Peace. *CORE*.
- Susmiihara. (2011). Konflik Arab Israel di Palestinas. *Adabiyah*, 49.
- Wibowo, H. (2014). Mandat Liga Bangsa Bngsa : Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948. *Al-Turas*, 308.
- Wiratama, N. S. (2022). Pancasila Dan Nasakom Dalam Mempersatukan Bangsa Indonesia (Kajian Kritis Sejarah Intelektual). *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi*, 2(2), 66–76.
- Wiratama, N. S. (2023). Manfaat Personal Website sebagai Media Pembelajaran Sejarah. 7(2), 33–39.



Zulkarnaini. (2021). Mengurai Gerakan Zionisme. Aceh: CV Nakah Aceh.